

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah fenomena kasus COVID19 yang hampir merata pada seluruh wilayah di Indonesia. Ketika Infeksi Virus Corona (COVID-19) sampai di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Tegal mulai melakukan local lockdown hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Pada awal merebaknya COVID-19, Pemerintah Kota Tegal mengambil upaya intervensi pertama dengan melaksanakan local lockdown pada 30 Maret 2020. Kedua, dilakukan isolasi wilayah, dan intervensi ketiga yakni pemberlakuan PSBB dari 23 April sampai 22 Mei 2020. relaksasi, sampai kemudian menuju kebijakan, strategi, dan intervensi itu telah memberikan hasil nyata.” Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi.

Pemerintah Kota Tegal yang berani mengambil kebijakan secara lantang dengan kepemimpinannya yang melakukan local lockdown tanpa menunggu himbuan dari pemerintah pusat. Hal ini tentu menuai banyak kecaman tidak hanya dari masyarakat Indonesia sendiri tetapi dari pemerintah daerah maupun pusat juga terjadi banyak kontroversi. Langkah tersebut diambil karena kabar warga Kota Tegal yang terpapar oleh

virus corona. Karena itulah Walikota Tegal sigap dalam menghadapi wabah COVID 19 dengan melakukan local lockdown tanpa menunggu intruksi dari pemerintah pusat. Berikut kasus per 26 Maret 2020 yang ada di Kota Tegal. **Tabel 1.1 Kasus COVID-19 26 Maret 2020 di Kota Tegal**

No.	Status	Jumlah
1.	PDP	21
2.	ODP	41
3.	Positif	1
4.	Meninggal	1
Total Kasus		82

Sumber: *corona.tegalkota.go.id*

Pemerintah atau kepala daerah di seluruh Indonesia di uji dengan adanya masalah ini, Mereka harus mempunyai siasat untuk menanggulangi bahkan mengurangi masalah ini di setiap daerah yang mereka pimpin termasuk di Kota Tegal. Banyak yang menyorot perihal kebijakan terkait COVID 19 di Kota Tegal karena melalui kebijakannya yang bisa dibilang lantang karena berbeda dengan pemimpin di daerah lain yang cenderung sama, karena hanya mampu mengambil kebijakan yang menurutnya zona nyaman atau menunggu intruksi dari pemerintah pusat.

Tetapi berbeda dengan Walikota Tegal yang melontarkan kebijakan yang pro maupun kontra, karena dinilai cukup lancang dengan kebijakan yang ada dipusat. Hal ini bisa kita lihat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menentang bahwa kebijakan lockdown bukan langkah tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Wali Kota Tegal telah mengambil berbagai langkah yang diambil dari mewabahnya virus corona. Wali Kota Tegal menutup beberapa akses jalan dalam jangka waktu tertentu, membatasi jumlah angkutan dan membatasi waktu operasional angkutan, yang tentunya dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas masyarakat yang keluar rumah. Hampir semua kegiatan dihentikan sementara dan kebijakan ini dikenal sebagai *Lockdown*.

Kebijakan *Lockdown* dapat membantu mencegah penyebaran virus corona didalam suatu daerah, sehingga diharapkan masyarakat di suatu daerah dapat mencegah penyebaran wabah yang cepat. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu menerapkan kontrol yang ketat di berbagai bidang dan secara cermat menimbang konsekuensinya baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Kegiatan *Lockdown* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang membahas Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui

kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan, Serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.

Diharapkan dengan adanya kebijakan *lockdown* pemerintah Kota Tegal ini dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Tegal. Kebijakan ini ditetapkan oleh berbagai pihak, terutama Pemerintah Kota Tegal yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik adalah suatu hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal. Kesenjangan atau kesalahan dalam kebijakan publik akan diketahui setelah kebijakan publik diimplementasikan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan dengan mengevaluasi implementasi suatu kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Lockdown Yang Dilakukan Pemerintah Kota Tegal Dalam Menanggulangi COVID-19 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Lockdown Pemerintah Kota Tegal dalam menanggulangi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi tambahan bagi penelitian lainnya terkait kebijakan pemerintah Kota Tegal dalam menanggulangi Covid-19, karena persoalan ini terbilang baru dalam riset di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait penanganan COVID-19, evaluasi bagi jajaran pemerintah Kota Tegal.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendapatkan referensi dan menghindari kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan ringkasan hasil penelitian terdahulu dan membandingkannya. Penelitian pertama adalah penelitian dari (Neneng Nurhalimah, 2020) Sosial Distancing atau Physical Distancing merupakan upaya menjaga jarak sosial. Dengan kondisi itu kita dihimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan

ibadah dari rumah. Berdasarkan studi yang ada saat ini kemungkinan penularan virus corona melalui udara atau airborne dapat saja terjadi.

Kedua, (RI, B., Lt, G. N. I., & Subroto, J. J. G., 2020). Kemudian ditemukan pula bahwa pemerintah akan sangat selektif dalam menetapkan PSBB di wilayah tertentu, terutama untuk PSBB berupa kegiatan di tempat atau fasilitas umum, karena pemerintah diwajibkan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta juga harus tunduk pada PSBB yang ditetapkan menteri dan bagi siapa saja yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana. Tulisan ini mengkaji implikasi hukum dari pemberlakuan PSBB dengan tujuan untuk memberikan penjelasan bagi masyarakat pada umumnya, termasuk pula bagi pemerintah daerah dan pihak swasta, terkait berbagai implikasi hukum dari terbitnya kebijakan PSBB.

Ketiga, (Asna Aneta, 2010), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo. Teori Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh public.

Keempat (Situmorang Chazali, 2016), Menurut Situmorang keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang

sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu public.

Kelima, (Haedar Akib, 2010) Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Keenam, Ahmad Fauzi Widyaiswara (2020), Menurut peneliti ketika menerapkan kebijakan PSBB, maka terdapat permasalahan yaitu tidak semua penyelenggara negara memahami tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena belum satu komando, sehingga mengalami bias dalam implementasi.

Ketujuh (Dian Herdiana, 2019). Hasil analisis menggunakan tiga indikator yaitu substansi kebijakan, para pelaksana dan kelompok sasaran menunjukkan bahwa PSBB memiliki substansi kebijakan yang jelas dan telah dilaksanakan oleh para pelaksana dengan baik, tetapi masalahnya yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan PSBB yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebijakan PSBB, keengganan masyarakat untuk mematuhi kebijakan PSBB dan ketidakmampuan masyarakat untuk mematuhi kebijakan PSBB,

Kedelapan penelitian dari (Marina Ika Sari, 2020), Melalui aplikasi khusus, masyarakat dapat mengakses informasi rinci tentang jumlah pasien, wilayah yang terdampak, riwayat kontak dan tempat yang pernah dikunjungi pasien corona, hingga pengumuman peringatan waspada jika berada di dekat pasien yang terinfeksi COVID19 dalam radius 10 km sehingga masyarakat dapat menghindari lokasi tersebut.

Keterbukaan pemerintah Korea Selatan terkait informasi corona ini dapat mengurangi kepanikan di tengah masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan partisipasi sipil dalam mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan dan strategi yang tepat dan efektif dari pemerintah telah meningkatkan kepercayaan publik sehingga masyarakat mau bekerja sama secara sukarela untuk mematuhi aturan pemerintah seperti melakukan social distancing, karantina mandiri, dan bersikap rasional dalam membeli kebutuhan sehari-hari.

Kesembilan penelitian dari (Dian Herdiana, 2020) Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Konsep social distancing dan lockdown yang awalnya dipergunakan dalam dunia medis sebagai upaya untuk membendung penyebaran dan memberantas suatu penyakit kemudian berkembang dalam konteks yang jauh lebih luas dan diadopsi menjadi sebuah model kebijakan pemerintah yang secara substansi bersifat mengikat dan memiliki sanksi hukum apabila melanggarnya. Pengembangan konsep social distancing dan lockdown yang menjadi instrumen kebijakan pemerintah berimplikasi kepada adanya tuntutan pengembangan konsep social distancing dan lockdown yang tidak hanya dilihat dalam perspektif kesehatan semata, tetapi juga dilihat dalam perspektif kebijakan publik yang mana baik dasar kebijakan maupun tujuan kebijakannya harus dapat dijelaskan menurut perspektif kebijakan publik. Konsep social distancing dalam perspektif

kebijakan publik dapat diartikan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan penyebaran penyakit dengan tetap memberikan akses kepada penduduk di suatu wilayah untuk melaksanakan kegiatan tertentu khususnya dalam rangka memenuhi keberlangsungan hidupnya meskipun didasarkan kepada batasan-batasan yang telah dibuat.

Kesepuluh, penelitian dari (Zulfa Harirah, 2020). Secara sederhana, kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin melakukan aksi nyata dalam menangani ancaman Covid 19 melalui pembentukan produk hukum turunan. Kebijakan apapun yang diambil oleh Pemerintah akan sangat berdampak pada proses percepatan penanganan Covid 19 di Indonesia. Dibutuhkan pula komitmen dari masyarakat untuk mematuhi segala aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah.

Kesebelas, (Anang Sugeng Cahyono, 2020). Konsep Collaborative Governance dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dilakukan mulai dengan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia internasional seperti WHO, dan negara luar yang juga mengalami persoalan sama, pemerintah pusat beserta semua jajaran dan lembaga terkait, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dengan pihak non pemerintah, pemerintah dengan masyarakat Prinsip collaborative governance yang diimplementasikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan sudah diambil akan tetapi belum menampakkan hasil yang optimal.

Keduabelas, (Mukharom, Havis Aravik, 2020) Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa wabah virus corona tidak jauh beda dengan kondisi di masa Rasulullah Muhammad Saw, dengan adanya wabah pes dan lepra pada saat itu.

Ketigabelas penelitian dari (Kurniawansyah, Heri, et al) Dalam penanganannya, pemerintah lebih memilih jalur kebijakan dari dua arah, yaitu kebijakan substantifnya (pencegahan) sambil memfokuskan diri pada kebijakan perbaikan ekonomi.

Keempatbelas, penelitian dari (Yunus, N. R., & Rezki, A. 2020) Lockdown dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran virus corona demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat.

Kelimabelas, (Fauzi, A. 2020) Untuk menangani wabah tersebut, agar tidak tidak berkembang pesat akhirnya, Pemerintah dalam hal ini Presiden RI mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Kembali ke PP PSBB COVID-19, menurut pakar hukum , selain judulnya sudah salah kaprah, materinya pun mengadopsi apa yang sudah dimuat di UU Karantina Kesehatan, padahal PP ini tadinya berisikan penjelasan yang lebih konkrit bagaimana melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut.

Tabel 1.2 Ringkasan Literature Riview

No	Jenis	Penulis	Temuan
1.	Teori Implemenasi Kebijakan	(Situmorang 2016), Chazali, 2011), (Parsons,	Implementasi kebijakan meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua yang dibuat dan dilakukan oleh Pemerintah adalah kebijakan publik. Secara sederhana, kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik.
2.	Teori Kebijakan Publik	(Suwitri, 2008), James Anderson (1969) dalam (Winarno, 2012:	Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang diambil pemerintah dan bagaimana tindakan yang dipilih, apakah melakukan sesuatu dengan program tertentu

		21)	atau tidak melakukan apapun. Pemerintah perlu membuat keputusan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu, bahkan mendiamkan saja juga termasuk sebuah kebijakan, dengan harapan mencapai tujuan Negara. Kebijakan dapat menunjukkan arah misi pemerintah untuk mencapai sasaran dengan disahkan oleh seorang aktor ataupun beberapa aktor dalam menanggulangi sesuatu permasalahan ataupun perkara.
--	--	-----	--

Berdasarkan literatur review di atas dengan kondisi itu kita dihimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Situasi ini juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu public.

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. (Dian Herdiana, 2020)

Menjelaskan bahwa konsep social distancing dan lockdown yang awalnya dipergunakan dalam dunia medis sebagai upaya untuk membendung penyebaran dan memberantas suatu penyakit kemudian berkembang dalam konteks yang jauh lebih luas

dan diadopsi menjadi sebuah model kebijakan pemerintah yang secara substansi bersifat mengikat dan memiliki sanksi hukum apabila melanggarnya.

Kebijakan apapun yang diambil oleh Pemerintah akan sangat berdampak pada proses percepatan penanganan Covid 19 di Indonesia. Dibutuhkan pula komitmen dari masyarakat untuk mematuhi segala aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah. 2020) Lockdown dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran virus corona demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat.

Kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Kemudian kebijakan publik jika kita merujuk pada literatur diatas maka kebijakan publik di Indonesia harus meniru kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan yang lebih transparan kepada masyarakatnya hal ini menimbulkan sinergisitas antara kedua belah pihak sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi keberhasilan dalam sebuah kebijakan itu sendiri. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini terfokus pada bagaimana implementasi kebijakan di yang berada di Kota Tegal sedangkan penelitian sebelumnya terfokus pada implementasi kebijakan tertentu mengenai COVID 19 dan konflik lainnya yang berkaitan dengan kebijakan.

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan Thomas R. Dye (1975) dalam (Suwitri, 2008) menekankan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang diambil pemerintah dan bagaimana tindakan yang dipilih, apakah melakukan sesuatu dengan program tertentu atau tidak melakukan apapun. Pemerintah perlu membuat keputusan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu, bahkan mendiamkan saja juga termasuk sebuah kebijakan, dengan harapan mencapai tujuan Negara.

Sedangkan pandangan James E. Anderson (1979) dan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (1978) dalam (Suwitri, 2008) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan wacanawacana yang dikembangkan oleh badan atau aktoraktor pemerintah untuk mencapai tujuan. Kebijakan publik yang dibentuk juga harus memberikan solusi atas perkara yang menimpa masyarakat, dimana mencakup arah tindakan pemerintah dalam merespon suatu permasalahan.

Kebijakan publik dalam pandangan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (1984) dan sejalan dengan pendapat David Easton (1965) dalam (Suwitri, 2008) dimana kebijakan publik merupakan suatu bentuk program yang diterapkan untuk mendatangkan nilai-nilai dan praktik yang diarahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Sedangkan Carl Friedrich dalam (Winarno, 2012: 2021) menyatakan bahwa politik adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah di daerah tertentu yang memberikan solusi untuk hambatan tertentu dan mengusulkan program yang berfungsi untuk mengatasi masalah, dalam mencapai suatu tujuan atau untuk mencapai

tujuan dengan maksud tertentu. Definisi ini menekankan bahwa politik tidak hanya terkait dengan tindakan pemerintah, tetapi juga dengan dorongan kelompok dan individu tentang masalah

tertentu.

Winarno juga berpendapat, seperti definisi yang dikemukakan oleh James Anderson (1969) dalam (Winarno, 2012: 21) bahwa kebijakan dapat menunjukkan arah misi pemerintah untuk mencapai tujuan ketika disetujui oleh satu aktor atau oleh beberapa aktor ketika menghadapi suatu masalah atau kasus. Konsep lain menurut Amir Santoso (1993) dalam (Winarno, 2012: 22) yang membandingkan perbedaan definisi yang dikeluarkan oleh para ahli yang berkepentingan dengan kebijakan publik, yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, pertama: ahli pemikiran yang sederajat dengan publik politik dengan tindakan pemerintah. Para ahli dari kelompok ini berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pemerintah dapat digolongkan sebagai ketertiban umum.

Kedua, kelompok ahli yang berspesialisasi dalam implementasi kebijakan, yang pada gilirannya dibagi menjadi dua bidang. Fraksi pertama memandang kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan, yaitu perumusan, implementasi dan evaluasi, sedangkan fraksi kedua melihat kebijakan publik sebagai asumsi yang dapat diprediksi dari sebab dan akibatnya. Sehingga kebijakan publik diperkuat dengan partisipasi aktor politik. Lebih lanjut, berdasarkan beberapa pendekatan dan sudut pandang para ahli, disebut kebijakan publik apabila kebijakan tersebut dibuat dan disahkan oleh pemerintah atau pihak terkait yang menjalankan kebijakan tersebut, berdasarkan kewenangannya. Menurut Thomas R.

Dye (1975) dalam (Suwitri, 2008) peristiwa ini disebabkan karena 3 kewenangan yang dimiliki pemerintah yaitu:

1. Pemerintah memiliki kekuasaan serta keahlian untuk memberlakukan kebijakan publik secara umum kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
2. Pemerintah memiliki kekuasaan serta keahlian untuk melegitimasi ataupun mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara umum kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
3. Pemerintah memiliki kekuasaan serta keahlian untuk menerapkan kebijakan publik secara paksa kepada masyarakat yang menjadi sasaran.

Berdasarkan definisi dan pemikiran para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu bentuk tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pejabat publik, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu, sehingga kebijakan atau program yang dikembangkan dapat memberikan manfaat. Dan memberikan solusi bagi masyarakat, permasalahan atau permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah yang memiliki tugas sebagai pejabat publik untuk merespon suatu masalah dalam bentuk tindakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum atau sesudah implementasi. Kedua (Dunn, 2003) Dalam kaitannya dengan analisis sebelumnya, kebijakan dikaji dengan pendekatan forecast dan preskripsi (ex ante), yang dikaitkan dengan masa depan. Analisis setelah implementasi kebijakan terkait masa lalu, melalui deskripsi dan evaluasi (ex post). Kajian ini menganalisis kebijakan dengan analisis ex post,

dimana analisis dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan, yaitu deskriptif, evaluatif dan preskriptif.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146-147) mendefinisikan pelaksanaan ketertiban umum sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta dalam konteks upaya terusmenerus untuk melakukan perubahan, besar dan kecil, yang ditentukan oleh keputusan politik organisasi publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979), yang dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program disahkan atau dirumuskan. khususnya peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pengesahan kebijakan pemerintah, termasuk upaya pengelolaannya dan memiliki akibat/dampak nyata terhadap masyarakat atau peristiwa. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Variabel-variabel tersebut antara lain: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau kelompok sasaran dimasukkan dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan kebijakan yang diinginkan, apakah lokasi suatu program adalah tepat, jika suatu kebijakan telah secara spesifik menyebutkan pelaksana dan jika suatu program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sementara itu, Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 199:2223) mengemukakan bahwa model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, implementasi kebijakan

terjadi. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementasi kebijakan tersebut. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan Sementara itu, konteks implementasinya adalah:
 - a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
 - b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
 - c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif tentang konteks kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksana, penerima yang dituju dari implementasi dan arena konflik yang dapat terjadi antara aktor pelaksana, serta kondisi sumber daya. pelaksanaan yang diperlukan. . Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

3. Teori Pandemi Corona Virus (COVID-19)

WHO mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan dimana-mana yang menyebar luas. Pandemi COVID 19 ini juga

berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan.

Menurut WHO, Virus Corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap.

Menurut WHO, virus corona COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Berdasarkan studi yang ada saat ini belum ditemukan penyebaran COVID-19 melalui udara bebas.

4. Definisi Konseptual

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses penerapan dari wacana kebijakan yang sudah diputuskan dengan disertai target dan sasaran yang ditentukan oleh pembuat kebijakan dan dilakukan oleh berbagai aktor yang terlibat, agar mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang diambil pemerintah dan bagaimana tindakan yang dipilih, apakah melakukan sesuatu dengan program tertentu atau tidak melakukan apapun yang didalamnya terdapat wacana-wacana yang dikembangkan oleh badan atau aktor-aktor pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Pandemi Corona Virus (COVID-19)

WHO mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan dimana-mana yang menyebar luas. Pandemi COVID 19 ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan. virus corona COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang

menyebarkan ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-

CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.

5. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka definisi operasional pada penelitian ini mengacu pada Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, meliputi:

Tabel 1.3 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator
1.	Komunikasi	a. Komunikasi Pemerintah Kota Tegal dalam pemberlakuan <i>lockdown</i> b. Branding <i>Mr. Lockdown</i> c. Tegal <i>Red Zone</i>
2.	Sumberdaya	a. Sumber Daya Anggaran b. Sumber Daya Fasilitas
3.	Disposisi	a. Hambatan Selama diterapkannya Kebijakan Lockdown
4.	Struktur birokrasi	a. SOP Pelaksanaan Kebijakan Lockdown

G. Metode Penelitian

1. Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya.

Sedangkan Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa metode kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penelitian triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode kualitatif yang dikemukakan oleh David Williams (dalam Moleong, 2006) bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini menggambarkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena, dan metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga membutuhkan analisis yang mendalam. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai. Penelitian kualitatif tidak pernah terlepas dari istilah analisis fenomenologi. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa dengan dampak adanya peristiwa tersebut.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni Purposive Sampling. (Sugiyono, 2015) menjelaskan Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel data berdasarkan atas pertimbangan kriteria tertentu yang dianggap bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik Purposive sampling juga menjelaskan narasumber yang

dipilih, dimana pemilihan narasumber berdasarkan ciriciri tertentu yakni pihak-pihak yang yang mengalami sekaligus mengetahui tentang kebijakan *lockdown*.

Adapun beberapa Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 Orang yaitu dari Dinas Sosial Kota Tegal sebagai implementor, Masyarakat Kota Tegal (Pedagang dan

Karyawan Honorer), Akademisi. Berikut biodata responden:

Nama : Siti Cahyani
NIP : 19730509 199803 2 004
TTL : Cilacap, 9 Mei 1973
Jabatan : Sekertaris Dinas Sosial Kota Tegal

Nama : Imam Subekhi
Pekerjaan : Wirausaha
TTL : Tegal, 24 Juni 1991

Nama : Winanda Dwi Prayogo
Pekerjaan : Pekerja Honorer
TTL : Tegal, 10 September 1999

Nama : Sukma Sejati Nur Muhammad

Pekerjaan : Mahasiswa

TTL : Tegal, 7 Mei 1999

3. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2006), pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Penetapan fokus dapat membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar (inclusion-exclusion criteria) suatu informasi yang diperoleh di lapangan, jadi fokus dalam penelitian kualitatif berasal dari masalah itu sendiri dan fokus dapat menjadi bahan penelitian.

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus keberhasilan dalam implementasi kebijakan Lockdown. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Fokus pada penelitian ini adalah pengaruh implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Tegal.

4. Lokasi Penelitian

A. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian merupakan waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, meliputi observasi dan wawancara dan proses bimbingan berlangsung, dimulai dari tanggal 30 Juni 2021 s/d 30 September 2021.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih menurut kriteria-kriteria tertentu. Penelitian ini berlokasi di Kota Tegal, Karena Kota Tegal yang menerapkan kebijakan Lockdown pertama kali sebagai acuan dan contoh bagi kota-kota lainnya dalam menekan persebaran virus corona. khususnya untuk penelitian ini meneliti di Dinas Sosial Kota Tegal sebagai salah satu instansi yang berkaitan dalam kebijakan *lockdown*.

5. Jenis Data

A. Data Primer

Jenis data ini akan diperoleh langsung dari lapangan, menggunakan teknik wawancara dengan informan. Teknik wawancara ini adalah dengan memberikan analisis terkait pertanyaan kepada informan. Penulis dapat memperoleh data yang sesuai dengan fakta di lapangan dengan mewawancarai informan dari dinas sosial

terkait peran Dinsos dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa *lockdown* di Kota Tegal.

B. Data Sekunder

Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari jurnal untuk mendapatkan kerangka teori dan referensi penelitian terdahulu, untuk gambaran umum data dari corona.tegalkota.go.id, dinsos.tegalkota.go.id , website resmi pemantauan COVID-19 Kota Tegal dan website resmi Dinas Sosial Kota Tegal, sedangkan untuk mendapatkan data-data dalam pembahasan terkait isi dan pedoman pelaksanaan kebijakan *lockdown*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pada pengumpulan data yaitu wawancara, narasumber dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Keterampilan

wawancara sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki cita-cita menjadi wartawan, peneliti, hakim, dan berbagai profesi lainnya.

Dalam hal ini wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data guna menemukan permasalahan yang akan diteliti dan peneliti mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti karena berhadapan langsung dengan narasumber.

b. Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian, c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tentang hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, rapat, dan lain sebagainya yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian yaitu tentang Implementasi

kebijakan lockdown di Kota Tegal guna memperoleh informasi lebih banyak untuk memperjelas suatu penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Menurut (Santos, 2014) analisis teknis data terdiri dari 4 proses sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Proses ini merupakan langkah di mana penulis mengumpulkan data yang mendukung penelitian dengan mewawancarai informan yang terkait dengan topik penelitian dan studi dokumentasi.

b. Pengurangan Data

Reduksi data adalah metode pemusatan dan pemilihan data yang telah diperoleh di lapangan. Data reduksi ini dimaksudkan untuk membuat beberapa data yang tersedia di lapangan menyederhanakan dan kemudian menyimpulkan data untuk membantu menulis lebih fokus pada topik penelitian.

c. Presentasi Data

Temuan-temuan dari pencarian studi akan disajikan dalam deskripsi singkat, tabel atau diagram.

d. Verifikasi dan Kesimpulan Data

Setelah semua data yang telah diorganisir disejajarkan dengan reduksi data dan penyajian data, kemudian dapat ditarik kesimpulan.